

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purpose activity*). Tujuan akuntansi sektor publik diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dari perspektif ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yaitu aktivitasnya berhubungan dengan usaha menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan domain publik meliputi lembaga-lembaga pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas dan organisasi nirlaba lainnya.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat tergantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta.¹

B. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Kartasasmita (1996) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menerangkan nilai-nilai sosial. Teori ini mencerminkan paradigma basis pembangunan yang bersifat *people centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Dari definisi di atas, pemberdayaan masyarakat dimengerti sebagai konsep yang lebih luas daripada hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pemberdayaan masyarakat lebih diartikan sebagai upaya menjadikan manusia sebagai sumber, pelaku dan yang menikmati hasil pembangunan, dengan kata lain pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat Indonesia.

¹Bastian, Indra, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua, (Salemba Empat: Jakarta, 2006), hlm. 13.

C. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang sangat erat hubungannya dengan ilmu akuntansi dan manajemen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata dari akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.²

Akuntabilitas adalah prinsip yang selalu diterapkan oleh seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini juga harus dipegang erat oleh perusahaan agar setiap karyawannya dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga tujuan bisnis mudah tercapai. Akuntabilitas juga merupakan sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan menjelaskan keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas menurut beberapa ahli sebagai berikut:³

a. Menurut Lawton and Rose

Akuntabilitas artinya proses saat seorang atau sebuah organisasi membuat laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

² Risna, *Pengertian Akuntabilitas dalam Akuntansi dan Penerapannya*, dalam <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-akuntabilitas/>, diakses tanggal 16 Januari 2021, pukul 11:00 WIB.

³*Ibid*

b. Menurut Adisasmita

Akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi.

c. Menurut Mardiasmo

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁴

Dari pengertian di pengertian atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa arti akuntabilitas merupakan sistem kontrol pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi masing-masing jabatan.

2. Prinsip-prinsip akuntabilitas

Adapun prinsip-prinsip akuntabilitas antara lain:

- a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
- b. Merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴Anonime, *Teori Akuntabilitas*, dalam <http://hantamkeras.blogspot.com/2017/10/teori-akuntabilitas.html?m=1> diakses pada tanggal 5 Maret 2021, pukul 19.00 WIB.

- c. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi.
- e. Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif.⁵

3. Jenis-jenis akuntabilitas

Akuntabilitas terdiri dari beberapa jenis tergantung konteks yang sedang dipakai. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah sebuah kondisi di mana seorang mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil kepada jabatan otoritas di atasnya. Misalnya saja akuntabilitas kepala dinas kepada wali kota, kepala cabang kepada direktur, atau menteri kepada presiden.

- b. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas Horizontal adalah tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan eksternalnya yang tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan. Tanggung jawab di sini biasanya berhubungan erat dengan penyelesaian tugas pada

⁵Risna, *Pengertian Akuntabilitas dalam Akuntansi dan Penerapannya*, dalam <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-akuntabilitas/>, diakses tanggal 16 Januari 2021, pukul 11:00 WIB.

pelayanan publik.⁶

D. Pengertian Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program KOTAKU adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 Kabupaten/Kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten/Kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Program KOTAKU merupakan kelanjutan Program Nasional

⁶Risna, *Pengertian Akuntabilitas dalam Akuntansi dan Penerapannya*, dalam <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-akuntabilitas/>, diakses tanggal 16 Januari 2021, pukul 11:00 WIB.

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM MP) Mandiri Perkotaan. Program ini menegaskan sebuah komitmen negara dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya. Program ini merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang sudah digulirkan sejak tahun 1999. Melalui program ini, masyarakat mampu menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. Jika hal ini berhasil, berarti pemerintah memiliki keterlibatan besar dalam program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan seperti di seluruh dunia. Ini menandai pergeseran orientasi pembangunan menuju pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini juga mengubah masyarakat yang sebelumnya sekedar objek pembangunan menjadi subjek pembangunan.⁷

PNPM Mandiri Perkotaan telah dimulai sejak 2007. Pemerintah melalui PNPM berupaya menanggulangi kemiskinan melalui penyaluran dana ke kelurahan-kelurahan untuk pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial dan ekonomi berupa

pinjaman dana bergulir. Tiap kelurahan penerima bantuan disalurkan melalui BKM, dana ini kemudian didistribusikan atau dicairkan kepada KSM di kelurahan tersebut. Bantuan dari program PNPM Mandiri Perkotaan ini bersifat bergulir yang diterima dan dikelola oleh BKM. Ini berarti, BKM

⁷Mochammad Qomaruddin, 2014, “*Pengaruh Swadaya Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan*”, Jurnal Disprotek, Vol. 5, No. 2, Juli, hlm. 70-72.

berfungsi sebagai perantara KSM dengan pemerintah. Pinjaman bergulir ini merupakan salah satu cara pengentasan kemiskinan. Keputusan kembali kepada KSM, apakah akan memanfaatkan fasilitas bergulir ini untuk tujuan pengentasan kemiskinan atau tidak. Dengan pinjaman bergulir, berarti masyarakat miskin memperoleh akses berupa pinjaman bersifat mikro, administrasi dan persyaratan yang sederhana sehingga mereka dapat meningkatkan tingkat perekonomian secara mandiri.

Kesuksesan KOTAKU ini sangat bergantung pada pengelolaan yang baik dan tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu unit dari BKM yang disebut UPK wajib membuat laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan atas kegiatan tersebut sesuai dengan standar yang berlaku. Penerimaan dana ini bagi BKM, menuntut BKM harus siap dan mampu mengelola keuangan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipasif, efisiensi menjadi agenda penting sehingga mampu mewujudkan akuntabilitas kepada Negara dan Publik.⁸

E. Pinjaman Dana Bergulir Dalam Program KOTAKU

Pinjaman Dana Bergulir menurut konteks KOTAKU adalah suatu program kegiatan yang dilakukan oleh BKM melalui UPK untuk memberikan modal kepada warga masyarakat menengah kebawah melalui mekanisme kelompok dan dikembalikan dengan cara angsuran.⁹ Program ini diberikan

⁸Mochammad Qomaruddin, 2014, "*Pengaruh Swadaya Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan, ...*" hlm. 75.

⁹Arman Effendi Bakar, *Kiat Sukses Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir di PNPM*

kepada warga masyarakat menengah kebawah untuk menghasilkan pendapatan dan biasanya tidak memiliki akses ke pinjaman lainnya, sehingga dapat mendukung tumbuhnya ekonomi dan usaha mikro.

Tujuan kegiatan pinjaman dana bergulir dalam program KOTAKU ini adalah menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga kurang mampu dengan pinjaman mikro berbasis pasar dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Dilakukan guna memperbaiki kondisi perekonomian mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Peran KOTAKU ini hanya membangun dasar-dasar solusi berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan. KOTAKU dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap tersebut perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat).

Dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir di tingkat masyarakat dilaksanakan secara sistematis. Mulai dari usulan masyarakat dalam bentuk proposal kemudian proposal tersebut dievaluasi oleh BKM dan dilakukan verifikasi proposal untuk menilai kelayakan dari usulan. Setelah usulan dan usaha dinyatakan layak untuk didanai, maka selanjutnya BKM menyalurkan dana melalui UPK untuk dicairkan kepada penerima manfaat atau pinjaman dana bergulir tersebut.¹⁰

Perkotaan, dalam <http://kotaku.pu.go.id>, diakses tanggal 15 Januari 2021, pukul 10:00 WIB.

¹⁰ Arman Effendi Bakar, *Kiat Sukses Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir di PNPM Perkotaan*, dalam <http://kotaku.pu.go.id>, diakses tanggal 15 Januari 2021, pukul 10:00 WIB.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan penelitian, maka perlu adanya penjabaran penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain sehingga dapat memberikan perbedaan dan gambaran dari penelitian lain. Penelitian yang dilakukan oleh Fidiana. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melihat fenomena keterlambatan pelaporan keuangan di KSM/BKM yang menunjukkan adanya masalah dalam proses akuntansinya atau dalam pelaksanaan programnya.

Penelitian ini dilakukan di KSM/BKM Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil survey penelitian ini menemukan beberapa hal. Pertama, tingkat partisipasi atau kehadiran pengurus sangat rendah sehingga hanya satu atau dua pengurus yang aktif. Hal ini menyebabkan terjadinya perangkapan tugas. Persamaan menggunakan metode analisis kualitatif, perbedaan fokus penelitian tentang rendahnya tingkat partisipasi atau kehadiran pengurus. Sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus penelitiannya tentang kinerja pinjaman dana bergulir dan metode penelitian menggunakan metode wawancara.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Angga Arisa Putra. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi *Stakeholder* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada *Business Development Center* Sriwijaya Kota Palembang. Penelitian ini

¹¹ Fidiana, dan Sutjipto Ngumar, 2018, “*Realitas Akuntabilitas Badan Keswadayaan Masyarakat di Kota Batu*”, Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis, Vol. 6, No. 2, Desember.

menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi *stakeholder* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan *business development center* Sriwijaya Kota Palembang adalah sangat baik. Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang kepengurusan program KOTAKU. Perbedaan penelitian ini menggunakan dua metode analisis sekaligus yaitu kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penelitian saya hanya menggunakan metode analisis kualitatif.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Rully Hikmahtul Maulidyah. Pinjaman dana bergulirdari PNPM Mandiri Perkotaan mempunyai peran penting untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan terhadap pendapatan usaha para penerima dana bantuan di kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, 2) efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan terhadap tingkat kemiskinan pada masyarakat di kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Metode analisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitiandi lapangan, pendapatan responden meningkat sesudah menerima pinjaman dana bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, Besarnya pinjaman dana bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan ternyata tidak diikuti oleh besarnya selisih pendapatan sebelum dan sesudah

¹²Putra, Angga Arisa, *Persepsi Stakeholder terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)(Studi Kasus pada Business Development Center Sriwijaya Kota Palembang)*, (Palembang: Skripsi tidak diterbitkan, 2019).

menerima PNPM Mandiri Perkotaan (hasil Korelasi Pearson), hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pinjaman yang diberikan ternyata belum tentu dapat meningkatkan pendapatan. Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang manfaat pinjaman dana bergulir. Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan metode analisis kualitatif.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Kristiniati. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Metode penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pada tahapan partisipasi yang terdiri dari tahapan monitoring dan evaluasi, tahapan pemeliharaan, dan pemanfaatan gedung telah berjalan dengan baik. Namun pada tahap pengambilan keputusan dan tahap implementasi harus ditingkatkan. Keberhasilan pelaksanaan program ini dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah komitmen kepala desa, partisipasi lembaga swadaya masyarakat, komitmen dan dukungan kelompok kepentingan. Sedangkan faktor penghambat adalah

¹³Maulidyah, Rully Hikmatul, 2014, “Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan terhadap Masyarakat Kurang Mampu”, Jurnal Ilmiah.

kurang partisipasi pengawas di Unit Pengelola Keuangan. Jadi ada dua lembaga swadaya masyarakat yang menunda pengembalian dana dan partisipasi masyarakat yang tidak dilibatkan dalam keseluruhan kegiatan masing-masing. Persamaan penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih terfokus pada keberhasilan program PNPM Mandiri Perkotaan, sedangkan penelitian saya lebih terfokus pada penerapan, pengembangan, kendala, serta solusi pada pinjaman dana bergulir program KOTAKU.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Juli Astutik. Penelitian ini adalah kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang penanganannya membutuhkan berbagai pihak. Tujuan penelitian bukan hanya menyangkut masalah hasil, namun yang tidak kalah penting adalah proses, pemberdayaan keluarga tidak semata-mata menyangkut aspek materil ataupun ekonomi dan teknologi, ataupun aspek non material seperti otonomi (kekuasaan). Lebih dari itu pemberdayaan berarti pula menyangkut bagaimana relasi sosial yang terjadi antara para pelaksana dan penerima, untuk menunjang keberhasilan sebuah program. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pola relasi antar pelaksana menunjukkan pola jaringan komunikasi yang bersifat semua saluran yang memungkinkan semua para pelaksana saling melakukan interaksi/relasi sosial, yang mengarah pada kerjasama (*cooperation*). 2) pola relai sosial

¹⁴Kristiniati, Rahayu dan Ilmi Usrotin Choiriyah, 2014, “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Desa Bligo Kabupaten Sidoarjo”, Jurnal JKMP, Vol. 2, No. 2.

antar pelaksana dengan para penerima menunjukkan jenis pola jaringan komunikasi dalam bentuk Y dan Lingkaran, sedangkan 3) pola relasi antara sesama penerima program menunjukkan pola lingkaran dan semua saluran, mengingat bahwa antar sesama penerima program masih bertetangga yang saling mengenal satu sama lain bahkan relatif terjadi komunikasi dalam kesehariannya, bahkan ada yang masih bersaudara. Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis kualitatif. Perbedaan penelitian ini lebih terfokus pada relasi sosial, sedangkan penelitian saya terfokus pada akuntabilitas pinjaman dana bergulir program KOTAKU.¹⁵

G. Kerangka Berpikir

KOTAKU berupaya melakukan penanggulangan kemiskinan di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan membuat kelompok untuk masyarakat menengah kebawah dan kelompok tersebut dinamai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Salah satu cara penanggulangan kemiskinan KOTAKU memiliki program yaitu pencairan pinjaman dana bergulir kepada anggota KSM.

Pinjaman dana bergulir dimaksudkan sebagai usaha produktif antar warga yang bersifat giliran. BKM dalam hal ini menjamin semua aset atau dana yang disalurkan oleh sekretaris dan UPK telah dilaksanakan secara tepat sasaran dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Pengelolaan dana

¹⁵ Astutik, Juli, 2013, "*Pola Relasi Sosial dalam Implementas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-NP) di Kota Malang*", Vol. 8, No. 2, Maret.

bergulir merupakan tanggung jawab UPK sebagai unit pelaksana dari BKM. UPK wajib melaksanakan keputusan dari BKM melalui pengelolaan dana bergulir termasuk melakukan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga hasilnya layak audit dan layak dipublikasikan.

Kerangka konseptual diartikan sebagai model kerangka berpikir, digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah.¹⁶ Mendasari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini disusun suatu model gambar kerangka berpikir, yaitu:

¹⁶Nursalam, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Media, 2011), hlm. 55.

